

GUNTINGAN BERITA

| ODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|---------|--------------------------------------|---------|-----------|
| U | <i>Merici</i> | 11 | 16-8-2002 |

■ Usaha Kecil dan Mikro

Alokasi Dana Kompensasi Subsidi BBM Rp 78,5 Miliar

Jakarta, NERACA

Pemerintah menambah alokasi dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pengembangan usaha kecil dan mikro sebanyak Rp 25 miliar.

"Dengan tambahan Rp 25 miliar ini, berarti total alokasi dana kompensasi subsidi BBM untuk tahun ini menjadi Rp 78,5 miliar," kata Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM,) Alimarwan Hanan kepada pers usai acara penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Pembangunan Seluruh Indonesia, kemarin (Kamis, 15/8).

Alimarwan mengatakan, pada 30 Mei lalu Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan dana subsidi BBM sebesar Rp 56,4 miliar melalui BPD. Penunjukkan BPD se-

bagai bank penyalur, menurut Menegkop, karena bank ini telah memiliki jaringan sampai ke seluruh pelosok daerah.

Dana Rp 56,4 miliar itu disalurkan untuk 564 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) yang tersebar di 110 kabupaten/kota di 30 propinsi/daerah istimewa.

Selanjutnya dengan tambahan dana Rp 25 miliar maka jumlah KSP/USP Koperasi yang akan menerima dana subsidi BBM menjadi 785 KSP/USP di 162 kabupaten/kota. "Belum semua kabupaten/kota menerima dana subsidi BBM, karena di Indonesia ada 370 kabupaten/kota," katanya.

Karena itu, dia berharap tahun depan pemerintah pusat tetap harus menyediakan alokasi dana untuk pemberda-

kabupaten/kota. "Minimal dana untuk pemberdayaan koperasi/UKM tersedia, meski mungkin jumlah kecil," kata Alimarwan.

Menurut Menegkop UKM, program pengembangan usaha kecil dan mikro melalui perkuatan KSP/USP tersebut merupakan program unggulan dari Kantor Menegkop dan UKM. "Tingkat keuntungan KSP/USP ada yang bisa mencapai 300%," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan berusaha agar pada tahun 2003 program tersebut bisa tetap berjalan. "Kita berharap semua kabupaten bisa menikmati dana tersebut pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Pada saat ini, kata Menteri, dana yang tersedia masih jauh dari yang diharapkan karena anggaran yang tersedia begitu terbatas. (13)